

Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap Belanja Daerah Provinsi Jambi

**Yois Nelsari Malau*, Adelia Br Ginting, Alviona Paskah Riani Br Sitepu,
Bernike Etimanta Br Munthe, Niarita Bukit**

Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

*Correspondence: yoisnelsarimalau@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak PAD, DP, IPM, JP, dan PDRB terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi 2017-2021. Populasi dan sampel berjumlah 55 data observasi dengan 11 Kabupaten/Kota dengan 5 tahun observasi sebagai sampel, teknik sampling jenuh merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Serta data yang terdapat pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2017-2021. Pengujian pada hipotesis penelitian ini diterapkan uji F dan uji t. Hasilnya menunjukkan PAD dan DP secara parsial memiliki pengaruh pada belanja daerah, serta IPM dan PDRB secara keseluruhan tidak mempengaruhi besar JP tidak berpengaruh tetapi signifikan. Sedangkan secara simultan PAD, DP, IPM, JP dan PDRB berpengaruh pada belanja daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Belanja Daerah.

ABSTRACT

The purpose of this research was conducted to find out the impact of PAD, DP, IPM, JP, and GRDP on Regional Expenditure in Jambi Province 2017-2021. The population and sample totaled 55 observational data from 11 districts/cities with 5 years of observation as a sample, saturated sampling technique is the technique used in this study. As well as the data contained in this study using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics for Jambi Province 2017-2021. Tests on the research hypothesis were applied to the F test and T test. The results show that PAD and DP partially have an influence on regional spending, as well as HDI and GRDP as a whole does not affect the size of JP but is not significant. Meanwhile, simultaneously PAD, DP, HDI, JP and GRDP have an effect on regional spending.

Keywords: Regional Original Income, Balancing Fund, Human Development Index, Total Population, Gross Regional Domestic Product, and Regional Expenditures.

PENDAHULUAN

Pengendalian pendanaan daerah yang diatur oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, seluruh kewajiban daerah digolongkan sebagai Belanja Daerah dan dicatat sebagai pengurangan terhadap nilai laba bersih untuk tahun anggaran yang berlaku. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk belanja daerah meningkat setiap tahunnya berbanding lurus dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Setiap tahun, APBD digunakan untuk menyusun rancangan belanja daerah. Fungsi belanja daerah terhadap APBD yaitu untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Dengan belanja daerah ini, tujuan dan komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam memberikan kewenangan demi menangani sendiri keperluan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah. Menurut Kainde (2013) besaran belanja daerah tergantung dari besarnya pemasukan daerah yang berkepentingan. Tentunya pemerintah daerah yang mendapat anggaran belanja pemerintah daerah yang mendapat anggaran belanja mesti sanggup menopang perluasan belanja daerah guna mensejahterakan warganya.

Pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur dan menggunakan sumber pendapatan daerahnya sesuai dengan tujuan masyarakat daerah menjadi faktor dari perwujudan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adanya kebijakan fiskal antar daerah sebagai akibat dari kebijakan kedaulatan daerah menyebabkan pemerintah pusat memberi bantuan berupa dana perimbangan. Pemerintah daerah memiliki kendali penuh atas penggunaan dana perimbangan, namun

karena kewenangan tersebut, mereka harus mampu melakukannya secara efektif dan efisien guna memaksimalkan layanan umum. Dalam rangka memperluas aset daerah dan memaksimalkan layanan umum, pemerintah daerah harus menyisihkan banyak dana berupa perkiraan belanja modal dalam anggaran penghasilan dan belanja daerah.

Laporan perekonomian Provinsi Jambi Maret 2021, pandemik Covid-19 berdampak secara signifikan terhadap perekonomian global, tak terkecuali Provinsi Jambi. Perkembangan perekonomian Provinsi Jambi melambat pada triwulan I dan III tahun 2020. Meskipun menunjukkan tanda-tanda perbaikan pada triwulan III, namun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2020 diperkirakan lebih lambat dibanding tahun 2019. Hal ini dirasakan sebagai akibat logis dari menurunnya kinerja semua sektor usaha, kecuali informasi dan komunikasi, akibat terbatasnya mobilitas masyarakat, aktivitas komersial dan produksi, serta meningkatnya kerja dan belanja secara online yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Triwulan IV tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,99% pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, menurun dari kontraksi triwulan III sebesar 0,85% dan penurunan dari pertumbuhan triwulan IV sebesar 3,41%. Pada Tahun 2019 Pendapatan daerah pemerintah Provinsi Jambi tercatat sebesar 4,58 triliun rupiah atau naik 3,69% dari tahun sebelumnya. Dana tersebut sebesar 2,89 triliun rupiah dari dana perimbangan, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 1,65 triliun rupiah dan 27,35 miliar rupiah berasal dari pendapatan lainnya yang berlaku. Pendapatan daerah yang berasal dari PAD tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Pendapatan daerah lebih tinggi karena adanya peningkatan pada dana perimbangan, yaitu naik sebesar 4,11%. Dari ketiga sumber pendapatan daerah pada tahun 2020, persentasi sumber pemasukan daerah pemerintah Provinsi Jambi sebgaiian besar bersumber dari dana perimbangan yaitu 64,25%. Sedangkan dari PAD menyumbang sebesar 35,48%. (Sumber: <https://jambi.bps.go.id>)

Pertumbuhan Ekonomi serta pengaruh PDRB, PAD, Jumlah Penduduk, IPM terhadap Belanja Daerah pada tahun 2013 - 2015 di Sumatera Utara menjadi topik penelitian Sanusi dan Yusuf (2018), dengan menggunakan pendekatan regresi panel. Dalam penelusurannya, terlihat bahwa belanja daerah di Sumatera Utara tidak signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, IPM, atau PAD. Sementara itu, belanja daerah Sumatera Utara dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh PDRB dan jumlah penduduk. Dalam penelitian Rahmawati dan Fajar (2017) menyebutkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan mempengaruhi Belanja Daerah. Dimana PAD dan Dana Perimbangan masih bergantung pada pemerintah pusat.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PAD, DP, IPM, JP dan PDRB terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Provinsi Jambi, yang datanya diambil dari website <https://jambi.bps.go.id/> dimulai dari bulan Mei 2022 sampai dengan 2023. Teknik Dokumentasi merupakan teknik untuk pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Populasi yang diterapkan pada penelitian ini yaitu Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi periode 2017-2021. Provinsi Jambi memiliki 11 kabupaten/Kota, dengan mamakai teknik sampling jenuh, dimana semua populasi diaplikasikan menjadi sampel, dengan 11 sampel dan durasi penelitian selama 5 tahun, sehingga penelitian ini memiliki 55 observasi. Model Penelitian adalah sebagai berikut : $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$

Keterangan: Y = Belanja Daerah; a = Konstanta; b = Koefisien Regresi; X₁ = PAD; X₂ = DP; X₃ = IPM; X₄ = Jumlah penduduk; X₅ = PDRB; e = error

HASIL

Tabel 1
One - Sample Komogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^b	Mean	0E-7
	Std. Deviation	91792198.29237989
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.060
Kolmogrov-Smirnov Z		.919
Asymp. Sig. (2 tailed)		.367

Sumber: data olahan

Tabel 1 menjelaskan bahwa nilai Asymp. Sig. (2tailed) yang dihasilkan bernilai $0,375 > 0,05$, dengan data yang sudah terdistribusi dengan normal. Tabel 2 menjelaskan nilai tolerance melebihi $0,01$ dan nilai VIF dibawah 10 , sehingga bisa diartikan tidak terjadi multikolinieritas. Tabel 3 menjelaskan nilai Asymp. Sig. (2 tailed) sebesar $0,339 > 0,05$, sehingga dapat diambil kesimpulan model regresi tidak didapati gejala autokorelasi. Sedangkan Tabel 4 hasil uji Park memperlihatkan bahwa seluruh variabel sig $> 0,05$ Sehingga dinyatakan Heteroskedastisitas tak terjadi.

Tabel 2
Uji Multikolonieritas

		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
	PAD	.222	4.513
1	DP	.301	3.327
	IPM	.293	3.408
	JP	.885	1.130
	PDRB	.397	2.519

Sumber: data olahan

Tabel 3
Runs Test

Unstadarized Reidual	
Test Value ^a	-17064918.17412
Cases, Test Value	27
Cases \geq Test Value	28
Total Cases	55
Number of Runs	32
Z	.956
Asymp. Sig. (2 tailed)	.339

Sumber: data olahan

Tabel 4
Uji Park

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	28.118	12.217		2.301	.026
PAD	3.584E-010	.000	.015	.051	.959
1 DP	-4.943E-009	.000	-.330	-1.337	.188
IPM	.144	.155	.233	.932	.356
JP	-3.867E-008	.000	-.002	-.017	.987
PDRB	1.137E-006	.000	.344	1.598	.116

Sumber: data olahan

Tabel 5
Analisis regresi linear berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-408652355.527	529597303.247		-.772	.444
PAD	.931	.304	.314	3.065	.004
1 DP	1.433	.160	.786	8.940	.000
IPM	5765724.070	6718660.070	.076	.858	.395
JP	-207.282	100.232	-.106	-2.068	.044
PDRB	-29.688	30.850	-.074	-.962	.341

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 5, maka persamaan model penelitian ini adalah:

$$BD = -408652355.527 + 0,931PAD + 1,433DP + 5765724.070IPM -207.282JP - 29.688PDRB$$

Penjelasan dari model adalah tersebut sebagai berikut:

1. Konstanta -408652355.527, berarti variabel bebas yaitu PAD, DP, IPM, JP, dan PDRB mempunyai nilai yang stabil sehingga BD turun 408652355.527;
2. Koefisien PAD 0.931, diartikan jika setiap kenaikan satu satuan DP, sehingga BD naik 0.931 satuan.
3. Koefisien DP 1.433, diartikan pada tiap kenaikan satu satuan IPM, maka BD naik 1.433 satuan.
4. Koefisien IPM 5765724.070, diartikan jika tiap kenaikan satu satuan IPM, maka BD naik 5765724.070 satuan.
5. Koefisien JP -207.282, diartikan jika tiap kenaikan satu satuan JP, Maka BD turun 207.282 satuan.
6. Koefisien PDRB -29.688, diartikan jika tiap kenaikan satu satuan PDRB, sehingga nilai BD turun 29.688 satuan.

Tabel 5 juga menjelaskan bahwa t_{tabel} 2.00958 dengan sig. 0,05. Maka berikut merupakan hasil dari pengujian secara parsial:

1. Hasil analisis uji t variabel PAD t_{hitung} sebesar 3.065 dan sig = 0.004 yang mencukupi kriteria nilai signifikan < 0.05. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3.065 > 2.009), dapat diartikan terjadi pengaruh dan signifikan pada belanja daerah.
2. Hasil analisis uji t variabel DP, t_{hitung} sebesar 8.940 dan sig = 0.000 dimana kriteria nilai signifikan terpenuhi < 0.05. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (8.940 > 2.009), dapat diartikan terjadi pengaruh dan signifikan pada belanja daerah.
3. Hasil analisis uji t variabel IPM, t_{hitung} sebesar 0.858 dengan sig = 0.395 dimana kriteria signifikan tidak terpenuhi. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0.858 < 0.009), artinya tidak terjadi pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
4. Hasil analisis uji t variabel JP, t_{hitung} sebesar -2.068 dengan sig = 0.044 dimana kriteria signifikan terpenuhi < 0.05. Nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ (-2.068 < 2.009), dapat diartikan tidak mempengaruhi dan signifikan pada belanja daerah.
5. Hasil Analisis uji t variabel PDRB, Nilai t_{hitung} sebesar -0.962 dengan sig = 0.341 dimana kriteria signifikan tidak terpenuhi. Nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ (-0.962 < -2.009), bisa diartikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Tabel 6
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.941 ^a	.886	.875	98128305.711

Sumber: data olahan

Tabel 6 menjelaskan Adjusted R Square bernilai 0,875 atau 87,5% dari variabel belanja daerah yang dijabarkan oleh variabel PAD, DP, IPM, JP, dan PDRB, dan 0,125 atau 12,5% tidak dianalisis pada penelitian ini. Sedangkan Tabel 7 menjelaskan $F_{hitung} = 76.396$, sig = 0.000, dengan $F_{tabel} = 2.40$, sig = 0,05; karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (76.396 > 2.40) dan nilai sig. 0.000 < 0.05 secara simultan dinyatakan ada dampak serta signifikan belanja daerah di Provinsi Jambi.

Tabel 7
Hasil Uji F

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	3546889761365850600.000	5	709377952273170050.000	76.396	.000 ^b
Residual	454993614036767870.000	49	9285583959934038.000		
Total	4001883375402618400.000	54			

Sumber: data olahan

Pengaruh Terhadap Pendapatan asli Daerah Pada Belanja Daerah

Berdasarkan dari analisis yang sudah dilakukan bahwa PAD berdampak dan signifikan pada belanja daerah Provinsi Jambi Tahun 2017-2021. Hal ini sependapat dengan Januarti dkk (2022) bahwa belanja daerah suatu pemerintah daerah akan selalu meningkat jika PAD juga demikian. Jika belanja daerah meningkat seiring dengan penambahan pendapatan asli daerah, sehingga bisa dikatakan jika daerah tersebut mahir dalam mengelola sumber dayanya. Hal ini juga sependapat dengan penelitian Devita dkk (2014) bahwa tingkat produksi masyarakat akan mempengaruhi PAD pada daerah yang mempunyai kesediaan sumber daya alam yang banyak dan didukung oleh sarana prasarana yang mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Pengaruh Dana Perimbangan Pada Belanja Daerah

Berdasarkan dari penelitian ini dinyatakan DP mempunyai pengaruh secara signifikan pada Belanja Daerah Provinsi Jambi 2017-2021. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Fajar (2017) yang menjelaskan bahwa dana perimbangan berfungsi sebagai bantuan atau bisa disebut anggaran yang berasal dari hibah pemerintah pusat dengan maksud sebagai penutup kesenjangan anggaran dalam mendanai keperluan dan penyelenggaraan daerah terhadap urusan pemerintah daerah. Hal ini juga sependapat dengan penelitian Ferdiansyah dkk (2018) pemerintah daerah dengan Dana Perimbangan yang besar menghabiskan lebih banyak uang untuk urusan daerah. Karena masih memanfaatkan anggaran perimbangan dari pemerintah pusat mengenai subsidi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, belanja daerah akan meningkat jika dana perimbangan bertambah.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Belanja Daerah

Hasil Uji yang sudah dilakukan bisa diketahui jika IPM tidak mempunyai pengaruh pada belanja daerah Provinsi Jambi tahun 2017-2021. Hal ini bertolak dengan penelitian Utomo (2019) dikatakan bahwa IPM digunakan sebagai tolak ukur kemajuan ekonomi suatu daerah sehingga mempengaruhi keputusan pemerintah daerah tentang bagaimana mengalokasikan anggaran modal mereka. Jika IPM naik, maka belanja daerah akan mengikuti. Sehingga dapat dinyatakan bahwa belanja daerah di provinsi jambi tidak menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Artinya teori tersebut tidak terjadi. Hal tersebut juga bertolak dengan penelitian Sari dan Yusniar (2019) yang menyatakan bahwa IPM dapat memberikan kewenangan pendanaan dan fleksibilitas belanja daerah sebagai syarat untuk mencapai kemandirian daerah dan kemampuan fiskal, serta untuk mendorong pembangunan daerah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat lokal. Dalam kajian ini, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola pembangunan daerah sesuai dengan proporsi daerahnya masing-masing melalui penyusunan anggaran sebagaimana diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Hasil dari penelitian dapat diketahui jika JP tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Jambi tahun 2017 – 2021. Hal ini bertolak dengan riset Liando dan Hermanto (2017) menyatakan bahwa ketika jumlah penduduk bertambah, pengeluaran pemerintah kabupaten/kota juga meningkat sehingga meningkatkan permintaan infrastruktur publik dari pemerintah daerah. Namun, menurut studi ini, belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, seperti pengadaan fasilitas umum, tidak dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Tetapi hasil uji ini selaras dengan penelitian Noeryanti dkk (2019) yang berpendapat bahwa anggaran belanja daerah yang dikeluarkan tidak berubah akibat pertumbuhan penduduk karena penduduk dipandang sebagai bentuk modal pembangunan, mempengaruhi banyaknya tenaga kerja sebagai produsen dan konsumen agar menghasilkan barang dan jasa untuk meningkatkan pemasukan dana daerah.

Pengaruh PDRB Terhadap Belanja Daerah

Penelitian yang sudah dilakukan didapatkan bahwa PDRB tidak mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Jambi tahun 2017 – 2021. Hasil uji ini bertolak belakang dengan penelitian Nasution (2019) yang mengatakan bahwa potensi sumber pendapatan suatu daerah meningkat sebanding dengan PDRBnya. Selain itu, akan digunakan untuk membayar program-program pembangunan daerah ketika pendapatan daerah meningkat. Pengeluaran daerah akan meningkat seiring dengan PDRB. Modal besar cenderung mengiringi PDRB yang besar. Pengalokasian sumber pendapatan untuk alokasi belanja didapatkan dari pertumbuhan ekonomi yang kurang signifikan yang

mana hal ini dapat menyebabkan PDRB ditolak. Hasil Uji ini juga bertolak belakang dengan penelitian Jatmiko (2018) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi diartikan sebagai peningkatan produktivitas penduduk dan pendapatan perkapita, yang mendorong peningkatan kesejahteraan yang dapat dilihat dalam penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dalam meningkatkan perekonomian. Tetapi dalam penelitian ini dinyatakan PDRB terus mengalami peningkatan tetapi untuk anggaran belanja daerah mengalami penurunan dikarenakan pengalokasian dana anggaran belanja daerahnya yang tidak tepat sasaran.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PAD, DP berpengaruh secara signifikan di Provinsi Jambi, hal ini dikarenakan PAD pada daerah yang mempunyai kesediaan sumber daya alam yang banyak dan didukung oleh sarana dan prasarana, dan Pemerintah daerah dengan Dana Perimbangan yang besar menghabiskan lebih banyak uang untuk urusan daerah. Namun IPM, PDRB, tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan, tetapi JP tidak berpengaruh tetapi signifikan pada Belanja Daerah Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah mengelola pembangunan sesuai dengan proporsi daerahnya masing-masing melalui penyusunan anggaran. Selanjutnya secara simultan PAD, DP, IPM, JP dan PDRB memiliki pengaruh di Provinsi Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2022. *Pengertian IPM*
- Devita, Andri dkk. 2014, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, *Tesis*, Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
- Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, Salmah Pattisahusiwa. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Inovasi*, 14(1)
- Januarti, R., Wulandari, S., Prasasti, S., Yanto, F., & Anwar, S. 2022. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Cafetaria*, 3(1), 1-13
- Kainde, C. 2013. Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3)
- Liando, Ivoni Ike., Hermanto, Suwardi Bambang., 2017, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6)
- Noeryanti, N., Setyawan, Y., & Hadinagara, H. 2019. Memprediksi Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan Metode Analisis Rantai Markov. *Jurnal Teknologi*, 12(1), 45–53.
- Nasution, Ulfah Nur Atikah, 2019, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2012-2016, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, USU
- Rahmawati, Masayu., Fajar, Catur Martian., 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung, *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63-76
- Sanusi, Anwar., Yusuf, Mohammad., 2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 3(1), 50-56
- Sari, Emilda., Yusniar, Retty., 2019, Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali Tahun 2010-2017, *Jurnal REP: Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(2)
- Utomo, Bayu Dwi 2019. Analisis Pengaruh Ketimpangan, Jumlah Penduduk Miskin, Investasi dan IPM terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13-14.